



**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK  
MEMPERCEPAT LAJU VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PERSIAPAN  
PELAKSANAAN MOTO GP DI PERTAMINA MANDALIKA INTERNATIONAL STREET  
CIRCUIT**

Oleh

**Fanila Kasmita Kusuma**

**Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Fakultas Perlindungan  
Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

**Email: [fanilakasmitakusuma@gmail.com](mailto:fanilakasmitakusuma@gmail.com)**

**Abstract**

Indonesia is holding the World Superbike (WorldSBK) which will take place from 19-21 November 2021 in Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara (NTB). In order for the event to run without causing anxiety in the midst of the Covid-19 pandemic, the government has intensified the Covid-19 vaccination for all people of Central Lombok until before the event starts. However, public trust in vaccines is still very lacking. This study aims to analyze the efforts of the Central Lombok regional government in accelerating the rate of Covid-19 vaccination in preparation for the implementation of the Moto GP at the Pertamina Mandalika International Street Circuit. So in its efforts, the Central Lombok regional government made an approach to increase public confidence in vaccination for the good of life in preventing the spread of Covid-19. In addition, the government has proposed several strict conditions for this event. Teams of race participants must quarantine for at least 5 days. And at least 70 percent of the total population of Central Lombok has been vaccinated. The government also gave instructions to the organizers of the World Superbike to form a special health protocol task force for supervision at the event location and provide masks for free.

**Keywords: Vaccination, Local Government, Pertamina GP**

**PENDAHULUAN**

Komunitas ilmiah global sepakat bahwa cara paling efektif untuk mengalahkan pandemi COVID-19 adalah melalui vaksinasi massal terhadap populasi di seluruh dunia. Pengembangan vaksin untuk COVID-19 telah menjadi demonstrasi yang kuat tentang bagaimana pendanaan publik yang substansial, fokus yang intens, dan tingkat kolaborasi ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat membantu memacu inovasi untuk memenuhi kebutuhan publik global dalam waktu yang sangat singkat. Namun, persetujuan dan peluncuran vaksin tidak segera mengakhiri krisis kesehatan, karena untuk mencapai

kekebalan kelompok akan memerlukan vaksinasi dari sebagian besar populasi, dan oleh karena itu merupakan tantangan besar (OECD, 2021<sup>1</sup>).

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan global untuk mengimmunisasi miliaran orang secepat mungkin, pemerintah perlu memberikan prioritas untuk menangani masalah kepercayaan – kepercayaan baik pada vaksin, maupun pada lembaga yang bertanggung jawab atas upaya vaksinasi. Mereka perlu meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap efektivitas dan keamanan vaksin, serta pada kapasitas pemerintah untuk mengelola tantangan logistik

<sup>1</sup> OECD (2020), “COVID-19: Protecting people and societies”, OECD Policy Responses to Coronavirus

(COVID-19), OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e5c9de1a-en>



secara kompeten. Meskipun efek “berkumpul di sekitar bendera” awal terlihat di awal pandemi, banyak negara mengamati meningkatnya tingkat ketidakpercayaan pada kapasitas pemerintah untuk menangani krisis dan menerapkan kebijakan yang koheren (OECD, 2019)<sup>2</sup>.

Hal ini terjadi karena menurunnya kepatuhan terhadap aturan terkait kesehatan masyarakat, dan meningkatnya skeptisisme tentang pemulihan ekonomi jangka panjang. Secara lebih luas, pandemi telah memicu disinformasi luas yang telah merusak pemahaman dan penerimaan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik<sup>3</sup>, dan ini meluas ke masalah penerimaan vaksin. Terlepas dari pengakuan luas bahwa COVID-19 adalah masalah kritis bagi orang-orang di seluruh dunia, banyak yang tetap tidak mau divaksinasi. Namun, pada Februari 2021, rata-rata 76% populasi di 11 negara OECD menunjukkan kesediaan untuk divaksinasi, meningkat dari hanya 66% pada Desember 2020<sup>4</sup>.

Tidak mengherankan, kepercayaan pada keamanan vaksin juga telah diuji secara serius oleh laporan baru-baru ini tentang efek samping yang jarang, tetapi serius, dengan kemungkinan hubungan sebab akibat dengan vaksin Oxford/AstraZeneca. Baik sinyal keamanan, maupun tanggapan yang berbeda dari regulator di seluruh dunia, kemungkinan besar telah merusak kepercayaan publik. Yang mengatakan, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin banyak yang cenderung menerima vaksinasi. Meskipun hal ini mungkin pada tingkat tertentu menunjukkan hilangnya ketakutan awal secara bertahap tentang

keamanan vaksin baru (walaupun kejadian baru-baru ini), ini mungkin juga mencerminkan bahwa divaksinasi secara bertahap menjadi normatif, dan semakin diterima sebagai jalan keluar dari pembatasan dan pengurangan<sup>5</sup>.

Kepercayaan terhadap vaksin juga harus dilengkapi dengan kepercayaan pada institusi yang bertanggung jawab untuk vaksinasi. Kurangnya penerimaan vaksinasi dapat berasal dari kegagalan sistem kesehatan dan institusi publik sebelumnya untuk melayani kelompok populasi tertentu secara efektif dan menimbulkan kepercayaan mereka. Secara umum, lembaga perwalian sangat penting untuk berfungsinya masyarakat secara efektif dan penerimaan kebijakan publik, dan khususnya selama krisis. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan seseorang bahwa orang atau lembaga lain akan bertindak sesuai dengan harapan seseorang tentang perilaku positif orang lain<sup>6</sup>, dan kepercayaan institusional diakui sebagai ukuran utama kinerja pemerintah dan panduan bagi pemerintah dalam mengembangkan tindakan kebijakan khusus untuk memperkuat kepercayaan publik, dibangun di seputar lima dimensi mandat pemerintah yang menurut penelitian sebagian besar menjelaskan kepercayaan masyarakat.

Vaksin juga digencarkan untuk diberlakukan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Seperti di negara-negara lain di seluruh dunia, sejak pandemi pertama kali diumumkan pada bulan Maret Tahun 2020, wabah COVID-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak yang menghancurkan bagi bangsa Indonesia bidang kesehatan dan ekonomi. Negara ini telah melakukan upaya

<sup>2</sup> OECD (2019), Government at a Glance 2019, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/8ccf5c38-en>

<sup>3</sup> de Figueredo, A. et al. (2020), “Mapping global trends in vaccine confidence and investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study”, *The Lancet*, Vol.396/10255, pp.898-908, [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31558-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0)

<sup>4</sup> Ipsos (2021), Global Attitudes on a COVID-19 Vaccine: Ipsos survey for The World Economic Forum, <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/docum>

[ents/2021-03/global-attitudes-on-a-covid-19-vaccine-march-2021-report\\_.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/global-attitudes-on-a-covid-19-vaccine-march-2021-report_.pdf).

<sup>5</sup> Bish, A. et al. (2011), “Factors associated with uptake of vaccination against pandemic influenza: A systematic review”, *Vaccine*, Vol.29/38, pp.6472-6484, <http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.06.107>.

<sup>6</sup> OECD (2017), Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264268920-en>.



ekstensif untuk mengatasi tantangan ini. Presiden Republik Indonesia membentuk tim nasional untuk percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada 3 September 2020 menetapkan pembentukan tim gugus COVID-19 pengembangan vaksin yang disupervisi oleh Menteri Koordinator Urusan Ekonomi.<sup>7</sup> Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Presiden tentang pekerjaan sehari-hari tim.

Sehingga Mulai 25 Oktober 2021 orang yang berusia 12 tahun ke atas akan diminta untuk menunjukkan bukti kelengkapan Vaksinasi COVID-19 atau hasil tes negatif untuk masuk indoor dan outdoor tertentu. Selanjutnya, perintah verifikasi vaksin acara besar negara efektif 15 November 2021, membutuhkan peserta acara besar (1.000 atau lebih peserta dalam ruangan atau 10.000 peserta atau lebih outdoor) untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 lengkap mereka atau hasil tes negatif yang diambil 72 jam terakhir, dan mengharuskan penyelenggara acara besar untuk melakukan vaksin (atau tes negatif hasil) verifikasi.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu mencegah penularan COVID-19 di komunitas sesuai dengan persyaratan verifikasi vaksin negara bagian dan lokal yang baru. Rencana ini dipersiapkan guna kelancaran untuk pembukaan kembali berbagai kebijakan yang sebelumnya ditutup dan dibatasi.

Vaksinasi dijadikan sebagai aturan keselamatan pekerja negara bagian dan lokal, dan panduan kesehatan masyarakat, dan Rencana Pencegahan COVID-19, dan Pedoman

Pencegahan COVID-19 dalam acara yang didalamnya terdapat kegiatan yang mengikutsertakan orang banyak dan memungkinkan terjadinya kerumunan. Kebijakan ini juga memastikan verifikasi vaksin dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan kebijakan non-diskriminasi dan privasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah untuk mempercepat laju vaksinasi covid-19 dalam rangka persiapan pelaksanaan Moto GP di *Pertamina Mandalika International Street Circuit*.

## LANDASAN TEORI

Vaksin adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling andal dan hemat biaya yang pernah diterapkan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun<sup>8</sup>. Menyusul penguraian urutan genom SARS-CoV-2 pada awal 2020 dan deklarasi pandemi oleh WHO pada Maret 2020, para ilmuwan dan perusahaan farmasi berpacu dengan waktu dalam upaya mengembangkan vaksin<sup>9</sup>.

Pada 22 Desember 2020, setidaknya 85 vaksin dalam pengembangan praklinis pada hewan dan 63 dalam pengembangan klinis pada manusia, di mana 43 di fase I, 21 di fase II, 18 di fase III, 6 telah disetujui untuk awal atau penggunaan terbatas, 2 telah disetujui untuk penggunaan penuh, dan satu vaksin telah ditinggalkan.

Dengan berita menggembirakan tentang persetujuan vaksin SARS-CoV-2, optimisme meningkat untuk mengakhiri pandemi melalui kekebalan kelompok<sup>10</sup>. Ambang batas untuk kekebalan kawanan SARS-CoV-2 diperkirakan

<sup>7</sup> Bramasta, Dandy Bayu. (2020). Update Virus Corona di Dunia 1 April: 854.608 Kasus di 201 Negara, 176.908 Sembuh Melalui <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/070200365/update-virus-coronadidunia-1-april-854608-kasus-di-201negara176908>> diakses pada 2 November 2021

<sup>8</sup> Meppelink, C. et al. (2019), "“I was Right about Vaccination”: Confirmation Bias and Health Literacy in

Online Health Information Seeking”, *Journal of Health Communication*, Vol.24/2, pp.129-140, <http://dx.doi.org/10.1080/10810730.2019.1583701>.

<sup>9</sup> National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020), *Framework for Equitable Allocation of COVID-19 Vaccine*, The National Academies Press, <https://doi.org/10.17226/25917>.

<sup>10</sup> OECD (2019), *Reforming Public Procurement: Progress in Implementing the 2015 OECD*



berkisar antara 50% dan 67%. Salah satu kendala utama yang dihadapi pencapaian tujuan tersebut diyakini keraguan vaksin dan skeptisisme di antara populasi di seluruh dunia<sup>11</sup>.

Keragu-raguan vaksin didefinisikan oleh Kelompok Ahli Penasihat Strategis WHO (SAGE) sebagai “keterlambatan dalam penerimaan atau penolakan vaksinasi meskipun tersedia layanan vaksinasi”<sup>12</sup>. Penerimaan vaksin ditentukan oleh tiga faktor: keyakinan, kenyamanan, dan kepuasan. Keyakinan didefinisikan sebagai kepercayaan pada keamanan dan efektivitas vaksin, kepercayaan pada sistem pengiriman sebagai sistem perawatan kesehatan, dan kepercayaan pada pembuat kebijakan.

Banyak orang meragukan keamanan vaksin, dan ini akan menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan oleh penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan vaksin secara luas<sup>13</sup>. Selain itu, kemudahan vaksinasi mengacu pada kemudahan relatif akses ke vaksin yang mencakup ketersediaan fisik, keterjangkauan, dan aksesibilitas.

Kepuasan terhadap vaksin dikaitkan dengan rendahnya realisasi risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan karenanya lebih banyak sikap negatif terhadap vaksin. Sikap skeptis tersebut ditunjukkan dalam jajak pendapat yang dilakukan di AS, di mana 50% orang Amerika menyatakan bersedia

menerima vaksin, 30% tidak yakin, sedangkan 20% menolak vaksin<sup>14</sup>.

Dalam survei lain orang dewasa Amerika, 58% berniat untuk divaksinasi, 32% tidak yakin, dan 11% tidak berniat untuk divaksinasi. Namun, satu penelitian lagi melaporkan 67% orang Amerika akan menerima vaksin COVID-19 jika direkomendasikan kepada mereka, meskipun ada perbedaan demografis yang signifikan dalam penerimaan vaksin.

Moto GP di *Pertamina Mandalika International Street Circuit* merupakan arena balapan yang akan digunakan sebagai arena pada Moto GP mendatang. Lombok Tengah resmi menjadi tuan rumah dalam acara ini. Sebagaimana yang telah diketahui, Dorna Sports telah memastikan Indonesia sebagai penyelenggara WSBK di The Mandalika pada 19-21 November mendatang. Untuk itu, ITDC terus berfokus untuk memastikan kawasan The Mandalika, khususnya JKK, siap menjamu perhelatan WSBK.

Saat ini konstruksi lintasan sirkuit telah mencapai 100 persen dan sedang menyelesaikan proses homologasi, sementara konstruksi beberapa fasilitas pendukung seperti Race Control, Pit Building, dan Medical Center ditargetkan selesai pada minggu keempat Oktober 2021.

Penyelenggaraan WSBK akan menjadi triger kebangkitan pariwisata Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru,

Recommendation, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris,  
<https://dx.doi.org/10.1787/1de41738-en>.

<sup>11</sup> Blastland, M. et al. (2020), “Five rules for evidence communication”, *Nature*, Vol.587/7834, pp.362-364, <http://dx.doi.org/10.1038/d41586-020-03189-1>

<sup>12</sup> Bowers, S. and D. Cohen (2018), “How lobbying blocked European safety checks for dangerous medical implants”, *BMJ* 363, <https://doi.org/10.1136/bmj.k4999>

<sup>13</sup> Brewer, N. and K. Fazekas (2007), “Predictors of HPV vaccine acceptability: A theory-informed, systematic review”, *Preventive Medicine*, Vol.45/2-3, pp.107-114, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2007.05.013>. [48]49S ee

[https://www.bmj.com/content/372/bmj.n580?int\\_source=trendmd&int\\_medium=cpc&int\\_campaign=usage-042019and](https://www.bmj.com/content/372/bmj.n580?int_source=trendmd&int_medium=cpc&int_campaign=usage-042019and)

<https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2021/02/C1217-supporting-cgs-to-address-vaccine-inequalities-next-steps.pdf>.50See

<https://www.gov.uk/government/news/community-champions-to-give-COVID-19-vaccine-advice-and-boost-take-up>.51<https://sco-op.me/denmark-homeless-COVID-19-vaccination/>.52<https://www.gov.uk/government/news/jc-vi-advises-prioritising-homeless-people-and-rough-sleepers-for-COVID-19-vaccine>.

<sup>14</sup> Buell, R. (2019), *Operational Transparency*, <https://hbr.org/2019/03/operational-transparency>



sekaligus memberikan multiplier effect bagi masyarakat lingkaran kawasan, NTB, bahkan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam mencapai tujuan penelitian peneliti ini memakai metode penelitian yang mampu digunakan untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian deskriptif yang tentunya dapat diartikan sebagai sebuah penelitian dengan proses pembuktian sebuah teori atau pemecahan masalah.

Peneliti menyelidiki bagaimana upaya pemerintah Lombok Tengah dalam mengencarkan vaksinasi covid-19 sebagai salah satu persiapan Pelaksanaan Moto GP di *Pertamina Mandalika International Street Circuit*. Peneliti juga memberikan berbagai fakta-fakta yang tampak dan didapatkan pada saat penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di Lombok Tengah.

Tempat dan objek penelitian dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan yang melibatkan pemikiran akademis dan praktis. Pada pertimbangan akademis fenomena yang terjadi menunjukkan adanya keterkaitan dengan pembahasan studi dan teori yang dipakai. Pada pertimbangan praktis dilihat dalam hubungannya secara geografis dimana letaknya mudah dijangkau, dan secara pemahaman kondisi daerah dimana datanya mudah didapat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyediaan Barang dan Jasa Berkualitas Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam Mengencarkan Vaksinasi

Kegiatan ini merupakan Indikator penting kompetensi pemerintah adalah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, yang ditunjukkan dengan penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi. pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk. Pengembangan beberapa vaksin COVID-19 yang efektif dalam waktu kurang dari satu tahun merupakan demonstrasi yang mengesankan dari kemampuan otoritas publik untuk merangsang upaya penelitian dan pengembangan ilmiah ke arah kebaikan yang lebih besar, dan contoh manfaat kerjasama internasional antara publik dan pemangku kepentingan swasta.

Namun, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa tidak ada standar kualitas atau keselamatan yang dikompromikan demi proses pengembangan dan persetujuan yang cepat. Seperti barang medis lainnya, vaksin COVID-19 telah, dan terus dikembangkan, dievaluasi, dan disetujui sesuai dengan pedoman peraturan dan persyaratan hukum yang ada<sup>15</sup>.

Mereka pada awalnya diuji di laboratorium (studi pra-klinis), dan kemudian dalam uji klinis yang melibatkan sukarelawan manusia.1 Uji coba ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi cara kerja vaksin dan yang terpenting, menjelaskan keamanan dan kemanjuran perlindungannya. Dalam keadaan yang lebih biasa, mengembangkan vaksin baru dapat menjadi proses yang panjang, dengan fase perkembangan yang berbeda dilakukan secara berurutan. Dalam kasus COVID-19, sejumlah faktor berkontribusi terhadap percepatan yang signifikan baik dari pengembangan vaksin maupun peluang kandidat yang berhasil (lihat Kotak2).

<sup>15</sup> Cinelli, M. et al. (2020), "The COVID-19 social media infodemic", *Scientific Reports*, Vol.10/16598, <http://dx.doi.org/doi.org/10.1038/s41598-020-73510-5>



Proses evaluasi dan otorisasi peraturan juga dipercepat, sebagian melalui peninjauan data secara terus-menerus saat tersedia, dan melalui penggunaan prosedur darurat yang memungkinkan penerimaan lebih banyak bukti awal dalam keadaan kebutuhan signifikan yang tidak terpenuhi atau keadaan darurat publik.

Kebijakan vaksin yang efektif dan inklusif menumbuhkan kepercayaan pada kompetensi pemerintah. Meskipun jelas bahwa pengembangan vaksin COVID-19 telah menjadi kisah sukses yang luar biasa, masih banyak yang harus dilakukan untuk menimbulkan kepercayaan pada program vaksinasi yang memberikannya.

Selain memastikan efektivitas vaksin dan integritas proses pengembangan, evaluasi dan pemantauan, pemerintah juga harus menunjukkan kapasitas mereka untuk mendapatkan pasokan vaksin, dan untuk merancang dan memberikan kampanye vaksinasi yang efektif dan inklusif.

Untuk memastikan pengiriman tepat waktu, pemerintah perlu untuk menetapkan kebijakan dan infrastruktur untuk mendistribusikan, menyimpan, dan mengelola vaksin di seluruh yurisdiksi mereka. Penguatan mekanisme kontrol antara entitas pemerintah nasional, masing-masing cabang bertanggung jawab atas tindakannya terhadap yang lain, dan bergerak melampaui aturan darurat akan membantu meningkatkan dukungan untuk kebijakan vaksin yang terlihat transparan, seimbang, dan inklusif.

Integritas dan akuntabilitas dalam pengembangan vaksin sangat penting. Sejak awal krisis COVID, pemerintah harus membuat keputusan cepat dan menerapkan banyak tindakan yang tidak direncanakan untuk melindungi masyarakat yang berisiko.

Pada bulan-bulan pertama, meluasnya penggunaan penghargaan langsung sebagai tindakan luar biasa untuk pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan telah menarik perhatian pada potensi risiko integritas, terutama

penipuan dan korupsi, yang dapat secara serius melemahkan efektivitas tindakan pemerintah jika tidak dimitigasi dengan benar.

Namun ada sedikit diskusi tentang risiko integritas spesifik yang terkait dengan pengembangan dan distribusi dan tindakan, mempublikasikan penghargaan dan kontrak kontrak mereka secara tepat waktu, dan mendokumentasikan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan pada pemasok dan pihak terkait. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengidentifikasi pemborosan, dan untuk menyelidiki penipuan dan penyalahgunaan dalam pembelanjaan yang secara khusus terkait dengan respons terhadap krisis virus corona.

Sementara pandemi menyoroti sejumlah risiko pengadaan dan langkah-langkah mitigasi terkait, upaya yang ditargetkan untuk meningkatkan pendekatan berbasis risiko terhadap pengadaan publik sudah ada sebelum krisis. Awalnya berfokus pada ancaman integritas, perhatian yang berkembang telah diarahkan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi risiko lain yang dapat secara signifikan mempengaruhi hasil dan dampak dari proses pengadaan publik, termasuk risiko operasional, keuangan, reputasi, sosial dan lingkungan dan kontekstual lainnya<sup>16</sup>.

Keadaan pandemi yang luar biasa saat ini juga menghadirkan peluang bagi organisasi internasional dan pemerintah untuk secara permanen memperkuat perlindungan integritas dan akuntabilitas dan mempromosikan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dalam pengadaan publik.

Saat ini, vaksinasi dijadikan sebagai salah satu syarat untuk kembali melakukan hidup normal layaknya sebelum terjadi pandemi. Vaksin menjadi syarat untuk keluar masuk kota atau negara. Selain itu, vaksin juga menjadi salah satu syarat untuk diadakannya sebuah acara. Namun, dengan banyaknya isu-isu miring terkait vaksin, maka masyarakat kurang bersemangat dan kurang tertarik untuk

<sup>16</sup> Murphy, J. et al. (2021), "Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Ireland and the United Kingdom", *Nature*

*Communications*, Vol.12/29, pp.12-29,  
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-20226-9>



melakukan vaksinasi. Sehingga, upaya pertama pemerintah daerah Lombok Tengah adalah dengan memberikan pemahaman dan pengertian dengan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.

Hal ini tentu saja bukan hanya karena akan diadakannya sebuah acara, namun juga sebagai gerakan masyarakat agar mau ikut andil dalam penekanan angka penyebaran covid-19 ini. Meskipun saat ini angka penyebaran sudah mulai menurun, dan beberapa daerah di Indonesia sudah mulai membuka kembali kehidupan yang sebelumnya dibatasi, bukan berarti kita sudah bebas dari bahaya covid yang masih ada di sekitar. Sehingga langkah pertama penyelamatannya adalah dengan mengikuti vaksinasi.

Komunikasi publik yang efektif dan berwibawa dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang tepat waktu dan akurat dari sumber terpercaya tentang mengapa vaksinasi adalah satu-satunya cara realistis untuk mencapai kekebalan kelompok dalam jangka menengah, dan yang penting untuk pembukaan kembali masyarakat dan ekonomi kita dengan aman. Pertamina telah mendelegasikan tugas menyampaikan laporan harian kepada warganya ke pusat krisis dan pakar ilmiannya.

Pemerintah juga dapat belajar dari satu sama lain melalui berbagi praktik komunikasi yang baik. Sebagai bagian dari Kepresidenan bermaksud meluncurkan Kampanye Keyakinan Vaksin Global untuk mengatasi kesalahan informasi kesehatan dan membangun kepercayaan vaksin melalui pendekatan yang komprehensif. Isu integritas kedua terkait vaksin COVID-19 berkaitan dengan interaksi antara pejabat publik dengan aktor lainnya. Pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk perwakilan dari sektor swasta dan kelompok kepentingan, dapat membawa wawasan berharga dalam debat kebijakan.

Namun, penting untuk menetapkan standar yang jelas mengenai cara di mana kepentingan pribadi mempengaruhi dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan, dan untuk mempromosikan keterbukaan, integritas dan keadilan untuk menjaga kepercayaan publik. Jika tidak, ada risiko bahwa beberapa kepentingan mungkin memiliki pengaruh yang tidak semestinya atas proses pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan, sehingga merugikan kepentingan publik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penghelatan acara Moto GP di *Pertamina Mandalika International Street Circuit* penghujung November mendatang telah dipersiapkan sebaik mungkin dalam berbagai kebutuhannya. Dari mulai sarana, prasarana, juga giat vaksinasi sebagai salah satu persyaratan untuk mengadakan sebuah acara yang memungkinkan terjadi kerumunan. Setiap penyelenggara, peserta, dan ornamen lainnya yang nantinya akan tergabung dan masuk kedalam kegiatan tersebut harus sudah memiliki kartu vaksin. Dalam artian sudah menunaikan vaksinasi dosis satu dan dosis dua.

Namun, nyatanya dalam gerakan vaksinasi ini masyarakat umum masih ragu dan tidak ingin melakukan vaksin karena berbagai macam hal. Maka dari itu, agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah Lombok Tengah melakukan upaya pendekatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi untuk kebaikan kehidupannya dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, pemerintah menggadangkan beberapa syarat ketat dalam acara ini. Tim dari peserta balapan harus melakukan karantina sekurangnya 5 hari. Dan sekurang-kurangnya telah dilakukan vaksinasi sebanyak 70 persen dari keseluruhan jumlah masyarakat Lombok Tengah.

Pemerintah juga memberikan intruksi kepada penyelenggara Wolrd Superbike untuk membentuk Satgas protokol kesehatan khusus



untuk pengawasan di lokasi acara serta menyediakan masker secara gratis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bish,A. etal. (2011), “Factors associated with uptake of vaccination against pandemic influenza: A systematic review”, *Vaccine*, Vol.29/38, pp.6472-6484,  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.06.107>.
- [2] Blastland,M. etal. (2020), “Five rules for evidence communication”, *Nature*, Vol.587/7834, pp.362-364,  
<http://dx.doi.org/10.1038/d41586-020-03189-1>.
- [3] Bowers,S. and D.Cohen (2018), “How lobbying blocked European safety checks for dangerous medical implants”, *BMJ*363,  
<https://doi.org/10.1136/bmj.k4999>.
- [4] Brewer,N. and K.Fazekas (2007), “Predictors of HPV vaccine acceptability: A theory-informed, systematic review”, *Preventive Medicine*, Vol.45/2-3, pp.107-114,  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2007.05.013>.
- [5] Buell,R. (2019), *Operational Transparency*,  
<https://hbr.org/2019/03/operational-transparency>.
- [6] Centers for Disease Control and Prevention (2021), *Rapid Community Assessment Guide: Understand your community’s needs regarding COVID-19 vaccines*,  
<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/vaccinate-with-confidence/rca-guide/>.
- [7] Chapman,G. and E.Coups (1999), “Predictors of Influenza Vaccine Acceptance among Healthy Adults”, *Preventive Medicine*, Vol.29/4, pp.249-262,  
<http://dx.doi.org/10.1006/pmed.1999.0535>.
- [8] Cinelli,M. etal. (2020), “The COVID-19 social media infodemic”, *Scientific Reports*, Vol.10/16598,  
<http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-73510-5>.
- [9] de Figueredo,A. etal. (2020), “Mapping global trends in vaccine confidence and investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study”, *The Lancet*, Vol.396/10255, pp.898-908,  
[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31558-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0).
- [10] ECDC (2020), *Overview of COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment plans in the EU/EEA and the UK*,  
[https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-of-EU\\_EEA-UK-vaccination-deployment-plans.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-of-EU_EEA-UK-vaccination-deployment-plans.pdf)
- [11] Eiser,J. etal. (2009), ““Trust me, I’m a Scientist (Not a Developer)”: Perceived Expertise and Motives as Predictors of Trust in Assessment of Risk from Contaminated Land”, *Risk Analysis*, Vol.29/2,  
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01131.x>. [39]EMA (2020), *COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring*,  
<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring>.
- [12] Evans,W. and J.French (2021), “Demand Creation for COVID-19 Vaccination: Overcoming Vaccine Hesitancy through Social Marketing”, *Vaccines*, Vol.9/4, p.319,  
<http://dx.doi.org/10.3390/vaccines9040319>.
- [13] Gagneur,A. etal. (2018), “Promoting Vaccination at Birth Using Motivational Interviewing Techniques Improves Vaccine Intention: The PromoVac Strategy”, *Journal of Infectious Diseases and Therapy*, Vol.6/5, pp.1–7,  
<http://dx.doi.org/10.4172/2332-0877.1000379>.





- [14] Giacalone, R. and J. Greenberg (1997), *Antisocial behavior in organizations*, Sage Publications.
- [15] Halabi, S., A. Heinrich and S. Omer (2020), "No-Fault Compensation for Vaccine Injury —The Other Side of Equitable Access to Covid-19 Vaccines", *New England Journal of Medicine*, Vol. 383/23, p.e125, <http://dx.doi.org/10.1056/nejmp2030600>.
- [16] Hordijk, L. and P. Patnaik (2020), "Covid-19: EU countries spent over €220m stockpiling remdesivir despite lack of effectiveness, finds investigation", *BMJ*, p.m4749, <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4749>.
- [17] Ipsos (2021), *Global Attitudes on a COVID-19 Vaccine: Ipsos survey for The World Economic Forum*, <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/global-attitudes-on-a-covid-19-vaccine-march-2021-report.pdf>.
- [18] Johnson Shen, M. et al. (2018), "The Effects of Race and Racial Concordance on Patient-Physician Communication: A Systematic Review of the Literature", *Journal of racial and ethnic health disparities*, pp. 117-140, <http://dx.doi.org/10.1007/s40615-017-0350-4>.
- [19] Junk, W. et al. (2020), *Interest Representation during the Corona Virus Crisis: Results from the European Union and Nine European Countries. Summary Report*, University of Copenhagen, University of Amsterdam, Trinity College Amsterdam, <https://61b80c4f-58c1-4b9d-bce6-c58106af2ef4.filesusr.com/ugd/9a0cb4dda8dac6e4e04e7fa88d30caab8b95a3.pdf>
- [20] Kantar (2021), *COVID-19 vaccine faces an increasingly hesitant public*, <https://www.kantar.com/inspiration/coronavirus/covid-19-vaccine-faces-an-increasingly-hesitant-public>
- [21] Lind, E. et al. (2000), "The winding road from employee to complainant: Situational and psychological determinants of wrongful-termination claims", *Administrative science quarterly*, Vol. 45/3, pp. 557-590, <http://dx.doi.org/10.2307/2667109>
- [22] Lundh, A. et al. (2017), "Industry sponsorship and research outcome", in Lundh, A. (ed.), *Cochrane Database of Systematic Reviews*, John Wiley & Sons, Ltd, <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.MR000033.pub3>.
- [23] Lunn, P. (2014), *Regulatory Policy and Behavioural Economics*, OECD Publishing, Paris, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264207851-en>.
- [24] McAuliffe, K. et al. (2017), "The developmental foundations of human fairness", *Nature Human Behaviour*, Vol. 1/2, <http://dx.doi.org/10.1038/s41562-016-0042-5>. [59] Meppelink, C. et al. (2019), "I was Right about Vaccination": Confirmation Bias and Health Literacy in Online Health Information Seeking", *Journal of Health Communication*, Vol. 24/2, pp. 129-140, <http://dx.doi.org/10.1080/10810730.2019.1583701>.
- [25] Milkman, K. et al. (2011), "Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 108/26, pp. 10415-10420, <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1103170108>.
- [26] Mindell, J. et al. (2012), "All in this together: the corporate capture of public health", *BMJ* 345, <https://doi.org/10.1136/bmj.e8082>. [19] Mondal, A. (2021), "The importance of



- 
- community engagement on COVID-19 vaccination strategy: Lessons from two California pilot programs”, *EClinicalMedicine*, Vol.32, p.100754, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100754>.
- [27] Murphy, J. et al. (2021), “Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Ireland and the United Kingdom”, *Nature Communications*, Vol.12/29, pp.12-29, <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-20226-9>.
- [28] Murtin, F. et al. (2018), “Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment”, *OECD Statistics Working Papers*, No.2018/2, OECD Publishing, Paris, <https://dx.doi.org/10.1787/869ef2ec-en>.
- [29] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020), *Framework for Equitable Allocation of COVID-19 Vaccine*, The National Academies Press, <https://doi.org/10.17226/25917>.